



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BIMO ARYO  
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR  
3. NHK : 124860

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 2.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 520.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000  
2. MOBIL, FORD FOCUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000  
3. MOBIL, FORD FIESTA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 223.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 753.135.881

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 3.996.135.881

**III. HUTANG** Rp. 12.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.984.135.881

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : PALOMES
- Jabatan : PELELANG AHLI MADYA KPKNL BOGOR
- NHK : 112415

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>435.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>603.500.000</b>
1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI NEW PAJERO SPORT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>26.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>28.012.183</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.092.512.183</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>344.811.734</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>747.700.449</b>

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FEBRIANO IRIAWAN ISHAQ
2. Jabatan : PELELANG AHLI MADYA KPKNL BOGOR
3. NHK : 165139

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.142.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.142.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>429.900.000</b>
1. MOTOR, PIAGGIO VESPA LX 150 IE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 14.200.000		
2. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
3. MOTOR, PIAGGIO VESPA 150 Tahun 1962, HASIL SENDIRI Rp. 47.200.000		
4. MOTOR, PIAGGIO VESPA 150 Tahun 1965, WARISAN Rp. 42.500.000		
5. MOTOR, PIAGGIO VESPA P 200 XE Tahun 2004, WARISAN Rp. 16.000.000		
6. MOBIL, JEEP CHEROKEE XJ Tahun 1999, HASIL SENDIRI , HADIAH , Rp. 205.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.076.000</b>
<b>D. SURAT BERTAHAPAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.044.000</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>52.243.699</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.634.263.699</b>



III. HUTANG

Rp. 270.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.364.263.699

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.